LAKIP

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 diselesaikan.

Penyusunan LAKIP ini secara umum bertujuan untuk melaporkan akuntabilitas kinerja dan sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan perencanaan strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun. Laporan Akuntabilitas ini disampaikan kepada Bupati Mamuju Tengah selaku pemberi wewenang, untuk selanjutnya mempertanggung jawabkan kewenangannya kepada masyarakat yang dilaksanakan secara periodik (berkala) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah .

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi uraian singkat tentang keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan, misi dan visi Bupati Mamuju Tengah. LAKIP ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju Tengah serta menjadi referensi dalam upaya tindak lanjut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengarah kepada penerapan *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan harapan semoga bermanfaat dan dapat digunakan untuk kebijakan lebih lanjut.

Tobadak , 02 Pebruari 2026
Mengetahui

Ir.USMAN, ST.M.M
Nip : 19770825201 001 1012

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja 1

1.3. Struktur Organisasi 1

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) 3

1.5. Aspek Strategis dan Isu Stategis 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA **5**

2.1. Restra. 5

2.2. Perjanjian Kinerja 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **13**

3.1 Capaian Kinerja Organisasai 13

3.2. Akuntabilitas Keuangan 21

BAB IV PENUTUP **22**

4.1. Kesimpulan 22

4.2. Saran 22

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahun 2025
2. Rencana Aksi Tahun 2025
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
4. Cascading dan Crosscuting

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan akuntabilitas kinerja merupakan laporan kinerja tahunan instansi yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan.

Perkembangan manajemen birokrasi saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan adalah paradigma kepemerintahan yang memberikan nuansa peran dan fungsi seimbang antara pemeritah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip antara lain; transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah untuk memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh instansi pemerintahan dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Tugas Dan Fungsi Unit Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Peraturan Bupati No 20 Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mamuju Tengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang susunan organisasi, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, kecamatan, staf ahli Bupati, kepegawaian, jabatan, kelompok jabatan

fungsional, tata kerja, dan ketentuan penutup. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Peraturan Bupati Mamuju Tengah No 20 Tahun 2024

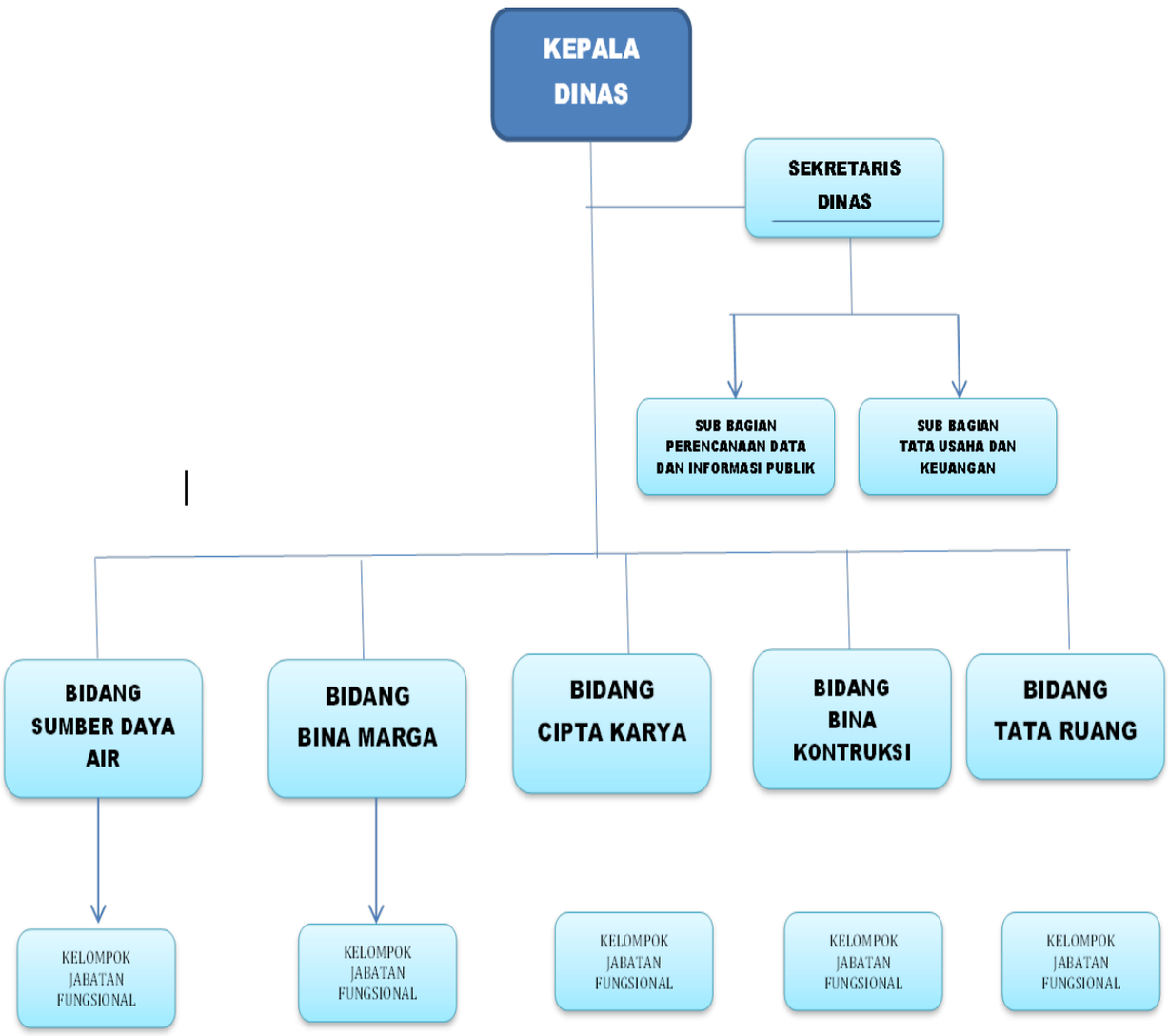

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya perlu ada dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat maupun golongannya.

Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah didukung oleh personil yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SD sampai dengan yang tertinggi S2 dengan Jumlah Pegawai ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 43 orang PW PUPR 33 Orang UPTD 65 Orang

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Megister (S2)	3 Orang
2	Sarjana (S1)	35 Orang
3	Diploma (D3)	3 Orang
4	SMA	2 Orang

1.5. Aspek Strategis dan Isu Strategis

Dari uraian diatas isu strategis (permasalahan utama) terkait fungsi tugas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya penyediaan infrastruktur Ke PU-an sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air baku untuk memenuhi kebutuhan air multi sector;
2. Belum optimalnya kondisi keteknisan prasarana irigasi dan fungsi kelembagaan untuk memberikan pelayanan air;
3. Belum optimalnya pengendalian daya rusak air pada jaringan irigasi, drainase, sungai, embung da pantai;
4. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan prasarana jalan untuk mendukung sistem transportasi daerah;
5. Belum optimalnya prasarana jalan untuk keselamatan dan kenyamanan, peningkatan kesadaran dan peran masyarakat pengguna jalan maupun pemanfaat jalan yang berbasis gender maupun dunia usaha dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
6. Belum adanya keterpaduan sistem jaringan transportasi dalam penyelenggaraan transportasi jalan;

7. Belum optimalnya membangun prasarana publik dan gedung pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
8. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi di wilayah tertinggal yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan;
9. Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten;
10. Belum optimalnya penataan aparatur dan penataan kelola dalam pembinaan jasa konstruksi dan pelayanan publik lainnya, terkait fungsi tugas.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENSTRA

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah adalah , Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah

"Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla' Tassisara."		
Misi Ke- 1 .Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar Misi ke- 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Misi ke-3 : Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas, hidup yang layak	Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pada Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Peningkatan prasarana sumber daya air untuk penyediaan air baku, mendukung ketahanan pangan dan pengendalian daya rusak air di wilayah permukiman
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan	Terpenuhinya kemantapan kondisi prasarana jalan (Konektifitas antar wilayah) semua sarana ke PU-an	Penetapan kebijakan revitalisasi irigasi secara bertahap dalam upaya optimalisasi produktifitas lahan.
Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati Daerah	Peningkatan kondisi jalan/ jembatan dan percepatan target capaian kemantapan jalan serta mengkoordinasikan sistem transportasi daerah
		Percepatan penyediaan prasarana sanitasi, instalasi air minum, mensinergikan program dengan institusi yang terkait.
		Mensinergikan sumber pembiayaan alternatif penyediaan bangunan gedung untuk penanganan pandemi dengan stakeholder terkait.
		Mengkoordinasikan kebijakan prasarana permukiman dan mendorong kepedulian masyarakat dalam kepedulian/pelibatan masyarakat dalam penyediaan prasarana permukiman maupun instalasi air minum
		Mengkoordinasikan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan ruang;
		Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat teknis secara terjadwal dan evaluasi langkah tindak lanjut
		Penyiapan rencana kerja pelaksanaan fungsi tugas untuk pencapaian target pada setiap tahapan program/ kegiatan
		Optimalisasi kinerja peralatan, pengujian material dan pembinaan jasa konstruksi

Tabel 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akses Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum	100%
		Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan layanan akses Sanitasi	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar Pembangunan	Persentase jalan Kondisi Baik	73%
		Persentase Irigasi yang terlayani	22,12%
		Indeks Kesesuaian dan Kualitas Pembangunan dengan RTRW	75,00
3.	Meningkatnya Luasan Wilayah yang bebas banjir	Persentase luas Kawasan Pemukiman yang bebas Banjir	19,74%
4	Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B
		Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0 %

2.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan **9 (Sembilang) program, 16 (Enam Belas) kegiatan** dan **43 (empat puluh tiga) sub kegiatan** dengan pembiayaan bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

Tabel 2.3. Program Kegiatan Tahun 2025

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)	
	TOLAK UKUR	SATUAN (UNIT)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	23 KM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1500 Liter/Detik
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	500 Rumah Tangga
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2525 M
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	5 Bangunan Gedung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	884,36 KM
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW/KKPRD Kabupaten/Kota	Dokumen

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan target rencana kinerja tahunan para pejabat disetiap instansi pemerintah dan sekaligus menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan sebagai penerima amanah dimana pada akhir tahun akan dijadikan sebagai dasar pengukuran kinerja dan penilaian.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan para pejabat di masing-masing instansi tidak hanya mampu mendapatkan dan menghabiskan anggaran, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan masyarakat. Perjanjian Kinerja bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2025 menyusun Perjanjian Kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja dengan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan para pejabat di masing-masing instansi tidak hanya mampu mendapatkan dan menghabiskan anggaran, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan masyarakat. Perjanjian Kinerja bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2025 menyusun Perjanjian Kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja dengan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : P/000/009/DPUPR/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUH. YAHYA SALEH, S.ST., M.Eng**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. ARAS TAMMAUNI**

Jabatan : Bupati Mamuju Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju Tengah, 6 Januari 2025

Bupati Mamuju Tengah	Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan RUANG
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
H. M. ARAS TAMMAUNI	MUH. YAHYA SALEH, S.ST., M.Eng Pembina Tk.I/(IVb) NIP. 19750403 200212 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akses Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum	100 %
		Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan layanan akses Sanitasi	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar Pembangunan	Persentase jalan Kondisi Baik	35 %
		Persentase daerah irigasi yang terlayani	20 %
		Indeks kesesuaian & kualitas pembangunan dan RTRW	100 %
3	Meningkatnya Luasan Wilayah yang bebas banjir	Persentase Kawasan Pemukiman yang bebas Banjir	100 %
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PUPR	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B
		Persentase temuan material pemeriksaan keuangan pada Dinas PUPR	0%

No.	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA	Rp 2.900.117.274,74
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA)	Rp 14.880.000,00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	Rp 10.343.476.893,44
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 3.728.553.641,00
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 513.991.040,85
6.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 1.720.579.042,15
7.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp 131.999.048,00
8.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 52.943.257.950,79
9.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 15.040.000,00

Mamuju Tengah, 6 Januari 2025

Bupati Mamuju Tengah

PIHAK KEDUA,

H. M. ARAS TAMMAUNI

Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan RUANG

PIHAK PERTAMA,

MUH. YAHYA SALEH, S.ST., M.Eng
Pembina Tk.I(IVb)
NIP. 19750403 200212 1 007

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025.

Pengukuran kinerja mencakup : 1). mengukur capaian kinerja dan membandingkan antara taget dan realisasi kinerja tahun ini 2). membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 3). membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dan 4). membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Dalam mengukur capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\ \%$$

Untuk membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja dan melihat seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan, digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 91 %	Sangat Baik
II	Lebih dari 75 % hingga 89.99 %	Baik
III	Lebih dari 65 % hingga 74.99 %	Cukup
IV	Lebih dari 50 % hingga 64.99 %	Kurang
V	50% kebawah	Sangat Kurang

Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan Indikator Kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
			TARGET (A)	REALISASI (B)	CAPAIAN
1	Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Meningkatkannya akses Air Bersih dan Sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	100	82,78%	82,78%
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan akses Sanitasi	100	72,79%	72,79%
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	73	25,19%	34,50%
		Persentase daerah irigasi yang terlayani	22,12	4,52%	20,48%
		Indeks Kesesuaian dan Kualitas Pembangunan dengan RTRW	75	100,00%	133,00%
3	Luasan Wilayah yang bebas banjir	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota Banjir	19,75	157,00%	794,00%
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah	B	B	B

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			Target	Realisasai	Capaian	Target	Realisasai	Capaian	Target	Realisasai	Capaian
1	Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Meningkatkannya akses Air Bersih dan Sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	100	91%	91%	100	83,68%	83,68%	100	82,78%	82,78%
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan akses Sanitasi	100	86,39%	86,39%	100	77,21%	77,21%	100	72,79%	72,79%
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	73	37,71%	51,66%	73	24,54%	33,61%	73	25,19%	34,50%
		Persentase daerah irigasi yang terlayani	22,12	0%	0%	22,12	4,24%	19,21%	22,12	4,52%	20,48%
		Indeks Kesesuaian dan Kualitas Pembangunan dengan RTRW	75	71,80%	95,73%	75	73,10%	97,46%	75	100,00%	133,00%
3	Luasan Wilayah yang bebas banjir	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota Banjir	19,75	1,66%	8,41%	19,75	43,31%	222,44%	19,75	157,00%	794,00%
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah	B			B			B		

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	TARGET RENSRA 2025	CAPAIN AKHIR KINERJA RENSTRA	CAPAIN KINERJA	PREDIKAT
1	Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Meningkatkannya akses Air Bersih dan Sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	82,78%	100%	84%	82,78%	Baik
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan akses Sanitasi	72,79%	100%	77%	77,21%	Baik
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	25,19%	59%	56, 96%	34,50%	Kurang
		Persentase daerah irigasi yang terlayani	4,52%	45%	9%	20,48%	Sangat Kurang
		Indeks Kesesuaian dan Kualitas Pembangunan dengan RTRW	100,00%	100%	73%	133,00%	Sangat baik
3	Luasan Wilayah yang bebas banjir	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota Banjir	157,00%	45%	96, 24 %	794,00%	Sangat baik
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah		B	B		Baik

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah
Laporan Renstra TC -27 pada aplikasi E Monev

Tabel 3.5 Analis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025			ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	FAKTOR PENDUKUNG SOLUSI YANG DI LAKUKAN
			Target	Realisasai	Capaian		
1	Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Meningkatkannya akses Air Bersih dan Sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	100	82,78%	82,78%	Akses Air Bersih Persentase tahun 2025 capaian sebesar 82,74 % dimana pada tahun 2024 capaiannya 83,68 % terjadi penurunan 0,89 %di sebabkan bertambahnya persentase penguna akses air bersih .	Pendataan sumber-sumber mata air baru untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan air baku lainnya,Peningkatan pembangunan prasarana air minum melalui jaringan perpipaan terlindungi.
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan akses Sanitasi	100	72,79%	72,79%	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan akses Sanitasi capaiannya Target 100 % Realisasi tahun 2025 yaitu 72,79 jadi capaian pada Tahun 2024 77,21 terjadi penurunan 4,42 % hal ini disebabkan bertambahnya jumlah Rumah tangga dalam Kabupaten Mamuju Tengah, Capaian realisasi ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah dalam penanganan Stunting di Kabupaten Mamuju Tengah dengan penyediaan sarana sanitasi berupa pembanguan MCK Komunal dan Pembangunan tangki septik individual. Capaian layanan sanitasi tahun	Sosialisasi penyediaan lahan untuk kesiapan lahan lokasi pembangunan prasarana MCK,Peningkatan pembangunan pengelolaan air limbah sekala kawasan.
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	73	25,19%	34,50%	Persentase Jalan Kondisi Baik dicapai pada tahun 2025 yaitu 34,50 % mengalami penurunan dari tahun 2024 yakni 33,61 % yakni terjadi peningkatan sekitar 0. 89 % dengan telah dilaksanakannya penanganan jalan melalui pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan dan pemeliharaan rutin jalan yang semakin berjalan dengan baik dan optimalnya penyerapan anggaran yang tersedia pada tahun berjalan untuk peningkatan konektivitas wilayah mulai dari pemukiman sampai kepusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.	Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan prasarana jalan untuk mendukung sistem transportasi daerah dengan terus melakukan peningkatan kondisi kemantapan jalan dan jembatan baik dengan penambahan ruas-ruas jalan maupun dengan peningkatan status jalan.
		Persentase daerah irigasi yang terlayani	22,12	4,52%	20,48%	Keberhasilan sasaran ini tdak terlepas dengan semakin meningkatnya persentase jaringan irigasi kondisi baik yang dilaksanakan melalui penanganan saluran irigasi antara lain dengan pengamanan sungai, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air permukaan.	Membentuk pola penanganan perbaikan kondisi irigasi dalam satu kesatuan sistem yang nantinya dapat mengoptimalkan kondisi keteknisan prasarana irigasi untuk pelayanan air yang memerlukan identifikasi kondisi dan fungsi jaringan dalam pelayanan air irigasi lebih lanjut.
		Indeks Kesesuaian dan Kualitas Pembangunan dengan RTRW	75	100,00%	133,00%	Keberhasilan sasaran ini tdak terlepas dengan akumulasi dari beberapa aspek penilaian yakni: 1). Kualitas Tata Ruang ,2). Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan dan 3). Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.	peningkatan pengendalian dan pemanfaatan penataan ruang perlu adanya pengoptimalan pengendalian dan pemanfaatan Penataan Ruang agar tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang.Selain itu upaya penggunaan aplikasi untuk kebutuhan tata ruang perlu dikembangkan lebih lanjut dan pemeliharaan sistem informasi pelayanan penataan ruang di Kabupaten Mamuju
3	Luasan Wilayah yang bebas banjir	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota Banjir	19,75	157,00%	794,00%	Keberhasilan sasaran ini tdak terlepas dengan semakin meningkatnya persentase jaringan irigasi kondisi baik yang dilaksanakan melalui penanganan saluran irigasi antara lain dengan pengamanan sungai, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air permukaan.	Pembentukan pola pengendalian daya rusak air pada jaringan irigasi, drainase, sungai, embung dan pantai dengan pembangunan prasarana pengendalian daya rusak air sesuai kondisi prasarana terkait denga n koordinasi batas kewenangan.
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah	B	B	B		Melakukan review kualitas cascading kinerja dari level tertinggi hingga terendah untuk mencapai hasil sesuai dengan levelnya,Melakukan review dan perbaikan Dokumen LAKIP

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 3.6 Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalkan kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
Meningkatnya Dukungan dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	86,14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	86,14	Mendukung
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Ha)	90,66	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Reancana tata pengaturan air dan tata pengairan Kabupaten (%)	90,66	Mendukung
Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Meningkatkannya akses Air Bersih dan Sanitasi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipan dan bukan Jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten (%)	82,43	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipan dan bukan Jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten (%)	82,43	Mendukung
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik. (%)	100,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik. (%)	100,00	Mendukung
	Persentase panjang drainase dalam keadaan baik di wilayah kabuapaten (%)	40,62	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	40,62	Mendukung
	persentase bangunan milik permerintah dan lingkungann ya yang ditata (Kawasan)	72,37	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten Kota (%)	72,37	Mendukung
	Rasio Bangunan Gedung Kabupaten Kota IMB,PBG dan sertifikat LAIK fungsi (Sertifikat)	92,18	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan ber- IMB dan persatuan bangunan yang di berikan Kabupaten Kota dalam tahun Eksisting (Angka)	92,18	Mendukung
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Panjang jalan berdasarkan yang di tetapkan kepala daerah dalam SK kewenagan jalan Kabupaten (%)	86,24	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten (%)	86,24	Mendukung
	Persentase ketaatan terhadap RTRW dan rencana rinci tata ruang (RRTR kabupaten) (%)	81,06	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW (%)	81,06	Mendukung

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah

Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasai	Capaian	Target	Realisasai	Capaian
1	Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal (SPM) Meningkatkannya akses Air Bersih dan Sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	100	82,78%	82,78%	10,368,325,321	8,546,778,516	82,43
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan akses Sanitasi	100	72,79%	72,79%	3,769,345,000	3,769,275,000	100,00
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	73	25,19%	34,50%	11,471,674,633	9,893,335,999	86,24
		Persentase daerah irigasi yang terlayani	22,12	4,52%	20,48%	3,101,469,170	2,472,708,700	92,28
		Indeks Kesesuaian dan Kualitas Pembangunan dengan RTRW	75	100,00%	133,00%	31,680,000	25,680,000	81,06
3	Luasan Wilayah yang bebas banjir	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota Banjir	19,75	157,00%	794,00%	3.320.505.502	2.894.371.500	87,17
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah	B	B	B			

3.2. Akuntabilitas Keuangan dan Realiasasi Keuangan

Total Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025 : **. 35.723.748.449,00** Program dan kegiatan dilaksanakan secara efisiensi dengan realisasi keuangan **Rp 30.610.490.618,00 .**

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban kinerja dinas yang sekaligus dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melakukan langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang dalam Renstra dengan kriteria di anggap sudah baik .
2. Kinerja keuangan dikelola sesui dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban mengacu pada perundang-undangan yang berlaku HEMAT,EFISIN dan EFEKTIF dengan meminimalkan kemungkinan pennyalah gunaan.
3. Program dan kegiatan dilaksanakan secara efisiensi dengan realisasi keuangan **35.723.748.449,00** Program dan kegiatan dilaksanakan secara efisiensi dengan realisasi keuangan **Rp 30.610.490.618,00 .**

4.2. SARAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik. Langkah tindak yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Perumusan program strategis beserta kualitas indikator kinerja harus terusditingkatkan. Penetapan kegiatan diselaraskan dengan program, sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan agar diupayakan terakselerasi dan mempunyai kaitan logis dengan indikator kinerja program strategis yang ingin dicapai.
2. Komitmen Personil dan perangkat dinas agar ditingkatkan dalam pencapaian program dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas.
3. Perencanaan dan penyediaan dana untuk pembiayaan kegiatan agar terus diupayakan guna pencapaian program strategis yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kegiatan yang kurang efektif mejadi lebih efektif dalam pencapaian indikator kinerja.

4. Peningkatan kualitas SDM Dinas harus terus ditingkatkan, khususnya mengenai Sistem AKIP.
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan agar lebih ditingkatkan kualitasnya